

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Permasalahan :

- Tidak seimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terlihat dari kondisi kerusakan dalam satu ruas jalan tidak dapat tuntas ditangani, dan masih banyak ruas jalan rusak yang belum ditangani.
- Keadaan topografi Kabupaten Pacitan yang berbukit-bukit dan memiliki tingkat kemiringan yang tinggi membuat tingkat kerusakan jalan yang tinggi pula.
- Rendahnya kesadaran pengguna jalan sehingga mempengaruhi cepatnya proses kerusakan pada jalan, misalnya tonase yang berlebih pada suatu jalan.
- Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan
- Masih terjadinya banjir kota dengan frekwensi lebih dari 5 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan saluran drainase kota tidak mampu menampung debit dan menyalurkan genangan air hujan lokal dan air yang berasal dari lereng perbukitan sehingga terjadi luapan banjir di beberapa lokasi.
- Masih adanya penduduk yang kesulitan dalam pemenuhan air bersih terutama di musim kemarau bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
- Tidak seimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terlihat dari kondisi kerusakan dalam satu ruas jalan tidak dapat tuntas ditangani, dan masih banyak ruas jalan rusak yang belum ditangani.
- Keadaan topografi Kabupaten Pacitan yang berbukit-bukit dan memiliki tingkat kemiringan yang tinggi membuat tingkat kerusakan jalan yang tinggi pula.
- Rendahnya kesadaran pengguna jalan sehingga mempengaruhi cepatnya proses kerusakan pada jalan, misalnya tonase yang berlebih pada suatu jalan.
- Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan
- Masih terjadinya banjir kota dengan frekwensi lebih dari 5 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan saluran drainase kota tidak mampu menampung debit, dan menyalurkan genangan air

hujan lokal dan air yang berasal dari lereng perbukitan sehingga terjadi luapan banjir di beberapa lokasi.

- Masih adanya penduduk yang kesulitan dalam pemenuhan air bersih terutama di musim kemarau bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
- Kondisi wilayah yang rawan bencana dan frekuensi serta beban lalu lintas mengakibatkan kondisi infrastruktur menjadi dinamis sehingga mempengaruhi laju perkembangan kondisi jalan baik.
- Keterbatasan anggaran yang tersedia belum menyentuh keseluruhan ruas-ruas jalan strategis sehingga penuntasan jalan dalam satu ruas menjadi terkendala dan dilaksanakan secara bertahap, sementara tuntutan masyarakat akan tersedianya kondisi jalan baik cukup tinggi.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih belum memadai sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal.
- Kurangnya kemampuan .. untuk mempertahankan/ meningkatkan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah - tengah keterbatasan alokasi pendanaan dan rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk ikut memelihara jaringan jalan, baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Poros Desa
- Kurang Optimalnya pemeliharaan Jaringan Jalan baik Ruas Jalan Kabupaten maupun ruas jalan poros desa.
- Kurang Optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada Baku Sawah di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Masih adanya konflik kepentingan antar Desa dalam pemanfaatan air baku sawah. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air irigasi tersebut maupun karena kendala batas administratif wilayah.
- Kurangnya kemampuan untuk mempertahankan/ meningkatkan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah keterbatasan alokasi pendanaan dan rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk memelihara jaringan jalan, baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Poros Desa.
- Kurang optimalnya pemeliharaan jaringan jalan baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Poros Desa
- Kurang optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada daerah irigasi di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Masih adanya konflik kepentingan antar desa dalam pemanfaatan air irigasi. Hal ini disebabkan adanya

kepentingan peruntukan sumber air irigasi dan kendala perbatasan administrasi wilayah.

- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas dan sebagian kondisi sudah tua
- Kurangnya kemampuan untuk mempertahankan/ meningkatkan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan dan rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk memelihara jaringan jalan, baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Poros Desa.
- Kurang optimalnya pemeliharaan jaringan jalan baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Poros Desa
- Kurang optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada daerah irigasi di wilayah Kabupaten Pacitan.
- Masih adanya konflik kepentingan antar desa dalam pemanfaatan air irigasi. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air irigasi dan kendala perbatasan administrasi wilayah.

Solusi :

- Mengusahakan sumber pembiayaan ke tingkat provinsi maupun pusat sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat tercukupi.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk menjaga kualitas dan umur bangunan.
- Pemasangan rambu-rambu jalan pada ruas jalan tertentu dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara jalan yang sudah ada.
- Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana jalan yang memadai
- Pengelolaan drainase secara berkelanjutan
- Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air.
- Mengusahakan sumber pembiayaan ke tingkat provinsi maupun pusat sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat tercukupi.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk menjaga kualitas dan umur bangunan.
- Pemasangan rambu-rambu jalan pada ruas jalan tertentu dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara jalan yang sudah ada.

- Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana jalan yang memadai
- Pengelolaan drainase secara berkelanjutan
- Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air.
- Adanya pemetaan zona rawan bencana untukantisipasi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam.
- Menyiapkan struktur perkerasan jalan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada
- Dengan tetap mengharapkan perhatian Pemerintah Provinsi maupun Pusat diharapkan mampu memberikan dukungan pembiayaan untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi untuk memenuhi harapan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik.
- Diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya yang ada sehingga kualitas pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan optimal dan lebih baik.
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang Sumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan ruas jalan baik jalan Kabupaten maupun Jalan poros desa ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan dari pemerintah daerah.
- Koordinasi Satker terkait untuk pemenuhan bangunan pelengkap jalan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dengan motivator camat sebagai penanggungjawab di wilayah
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang Sumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan jaringan irigasi ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi petani sebagai pengguna jaringan irigasi untuk selalu memelihara Jaringan irigasi dan bangunan air.
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan ruas jalan baik jalan Kabupaten maupun jalan Poros Desa ditengah keterbatasan alokasi dari pemerintah Kabupaten.
- Koordinasi Satker terkait untuk pemenuhan bangunan pelengkap jalan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dengan motivator camat sebagai penanggungjawab di wilayah.
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan pemeliharaan jaringan irigasi ditengah keterbatasan alokasi dari pemerintah Kabupaten
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi petani sebagai pengguna jaringan irigasi untuk selalu memelihara jaringan irigasi dan bangunan air.
- Penambahan biaya pemeliharaan dan pengadaan barang
- Memaksimalkan anggaran yang ada
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan ruas jalan baik jalan Kabupaten maupun jalan Poros Desa ditengah keterbatasan alokasi dari pemerintah Kabupaten.
- Koordinasi Satker terkait untuk pemenuhan bangunan pelengkap jalan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dengan motivator camat sebagai penanggungjawab di wilayah.
- Koordinasi untuk bantuan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk penanganan pemeliharaan jaringan irigasi ditengah keterbatasan alokasi dari pemerintah Kabupaten
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi petani sebagai pengguna jaringan irigasi untuk selalu memelihara jaringan irigasi dan bangunan air.

4. URUSAN PERUMAHAN

Permasalahan :

- Masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 107,24 Ha atau 0,077% dari 138.987,16 Ha wilayah Kabupaten Pacitan.
- Rumah tidak layak huni akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penghuninya sehingga harus ditangani agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat
- Masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 93,24 Ha atau 0,067% dari 138.987,16 Ha wilayah Kabupaten Pacitan.
- Rumah tidak layak huni akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penghuninya sehingga harus ditangani agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat

- Tingkat ekonomi masyarakat, ketersediaan air bersih.
- Masih adanya daerah yang rawan terhadap air bersih
- Masih adanya limbah pabrik yang di buang ke sungai sehingga dapat menimbulkan polusi/ pencemaran terhadap air
- Banyaknya volume sampah sehingga armada kebersihan dan petugas kewalahan. Belum efektifnya penerapan '3R' (Reduce, Reuse, Recycle) dalam dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat.
- Sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan Open Dumping, sehingga proses pengolahan sampah belum ramah lingkungan.
- Belum adanya buzem di hulu sungai, penampung batas saluran masih belum cukup menampung debit air hujan lebih dari 2 jam
- Belum adanya Septitank yang mempunyai standar
- Kurangnya pemahaman masyarakat dimengetahui batas sempadan jalan, sempadan sungai & sempadan pantai
- Masih banyaknya dusun belum berlistrik dan masyarakat menggunakan sistem curah, Pemukiman penduduk yang tersebar tidak mengumpul memerlukan jaringan yang lebih panjang sehingga memerlukan biaya yang besar.

Solusi :

- Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman
- Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, dan layak.
- Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.
- Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman
- Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, dan layak.
- Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.
- Penyediaan MCK komunal dan penyediaan air bersih.
- Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan
- Perlunya sarana dan prasarana pembuangan air limbah dan Sosialisasi penyambungan sambungan rumah ke sistem jaringan air limbah
- Perlunya Penambahan armada, personil dan pendanaan dan Sosialisasi pengelolaan sampah

- Membangun fasilitas pengurangan sampah diperkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.
- Dibuatkannya pengolah banjir kota yaitu buzem
- Perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan permukiman kumuh sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- Perlunya sosialisasi tentang IMB
- Melaksanakan Kegiatan Pengembangan jaringan listrik standar PLN dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan dana APBD dan mengusulkan pengembangan jaringan listrik pedesaan ke Pemerintah/ PLN dan pengembangan EBT (energi baru terbarukan).

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Permasalahan :

- Belum seluruhnya Ibu kota kecamatan memiliki dokumen RDTR sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007
- masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang
- Belum seluruhnya ibu kota kecamatan memiliki dokumen RDTR sesuai UU nomor 26 tahun 2007.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang.
- Keterbatasan anggaran untuk cetak peta ukuran A1 sejumlah 171 desa/kelurahan (prodak RTRW Kab Pacitan)
- Peta digital belum di upload dalam website pemkab (Peta digital ada di BAPPEDA) produk RTRW Kab Pacitan

Solusi :

- Merencanakan penyusunan Perda RDTR mulai tahun 2012.
- Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan ruang.
- Segera menyusun dokumen RDTR setiap kecamatan sekaligus pengajuan Perda RDTR.
- Mempublikasikan dokumen Perda RDTR pada masyarakat.
- Perlunya sosialisasi tentang IMB
- diberikan file peta dalam bentuk soft kopi (di CD) file di BAPPEDA (produk RTRW Kab Pacitan)
- Koordinasi ke BAPPEDA dan Pengelola Website Pacitan
- Pembebasan lahan masyarakat (misal : pembebasan lahan ruwasja di sepanjang JLS untuk diajdikan RTH)

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Permasalahan :

- Masih adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD;
- Adanya perubahan indikator dalam dokumen perencanaan.
- Belum semua usulan program dan kegiatan dapat direalisasikan dalam APBD mengingat kemampuan APBD Kabupaten Pacitan yang masih sangat terbatas.

Solusi :

- Adanya evaluasi dokumen perencanaan pembangunan;
- Melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan indikator dalam dokumen perencanaan.
- Mengusulkan program/ kegiatan yang belum bisa dibiayai APBD Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Permasalahan :

- Sampai dengan tahun 2011 kebutuhan lahan untuk lokasi pembangunan pelabuhan niaga termasuk untuk jalur akses menuju pelabuhan belum sepenuhnya terpenuhi
- Pembangunan terminal Pacitan yang juga merupakan bantuan dari pemerintah pusat telah memasuki tahap II, namun masih terdapat satu bidang lahan yang direncanakan belum terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan.
- Prasarana pejalan kaki (trottoar) tidak berfungsi dengan baik, masih berfungsi untuk taman, pedagang kali lima dan lahan parkir
- Banyak rambu-rambu yang tertutupi dengan pepohonan dan papan reklame sehingga mengganggu pandangan
- ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan pelabuhan niaga termasuk untuk jalur akses menuju pelabuhan belum seluruhnya selesai karena masih ada 15 orang yang belum setuju terkait harga lahan
- Dari kebutuhan lahan yang direncanakan masih menyisakan lahan yang belum dibebaskan
- Persiapan pembangunan gedung terminal harus menunggu kesiapan gedung dan landasan terminal baru
- Ketersediaan SDM yang menangani terminal, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir

secara kualitas dan kompetensi menurut capaian SPM masih belum memenuhi target yang ditetapkan

- Frekuensi kecelakaan lalu lintas semakin tinggi selain disebabkan oleh faktor manusia juga yang paling menonjol disebabkan minimnya sarana lalu lintas, serta kondisi kelaikan kendaraan yang belum memenuhi standar keselamatan ideal
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Ketersediaan SDM yang menangani terminal, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir secara kualitas dan kompetensi menurut capaian SPM.
- Frekuensi kecelakaan lalu lintas semakin tinggi selain disebabkan oleh faktor manusia juga yang paling menonjol disebabkan minimnya sarana lalu lintas, serta kondisi kelaikan kendaraan yang belum memenuhi standar keselamatan ideal.
- Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Solusi :

- Pada tahun 2011 melalui anggaran pendapatan belanja daerah telah dianggarkan biaya pembebasan lahan seluas 1,1 Ha dan kekurangannya akan dibebaskan tahun 2012
- Desain terminal menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada
- Melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait untuk menertibkan fungsi trotoar dan sarana fasilitas LLAJ
- Akan diterbitkan peraturan Bupati tentang pemasangan reklame dan iklan di jalan raya
- 15 orang yang belum yang belum sepakat tersebut pembayaran dilakukan dengan proses konsiyasi melalui Pengadilan Negeri Pacitan
- Menunggu kesiapan terminal baru untuk membangun gedung terminal baru yang berada dilokasi terminal lama
- Untuk meningkatkan ketersediaan SDM yang menangani terminal, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir secara kualitas serta memenuhi kompetensi diperlukan mengikut sertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan. Sebagaimana yang telah ditawarkan setiap tahun serta penyelenggaraannya oleh Pusat Pengembangan

SDM Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing dildrim secara bertahap

- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas terutama pada daerah rawan kecelakaan, Menambah penerangan jalan umum, serta meningkatkan standar keselamatan kendaraan dengan melengkapi sarana pengujian kendaraan bermotor sesuai standar pelayanan minimal
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat serta memperluas informasi publik terkait pelayanan agar kualitas dan kuantitasnya bisa menjadi lebih optimal.
- Untuk meningkatkan ketersediaan SDM yang menangani terminal, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir secara kualitas serta memenuhi kompetensi diperlukan mengikut sertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan. Sebagaimana yang telah ditawarkan setiap tahun serta penyelenggaraannya oleh Pusat Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing dikirim secara bertahap.
- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas terutama pada daerah rawan kecelakaan, Menambah penerangan jalan umum, serta meningkatkan standar keselamatan kendaraan dengan melengkapi sarana pengujian kendaraan bermotor sesuai standar pelayanan minimal.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat serta memperluas informasi publik terkait pelayanan agar kualitas dan kuantitasnya bisa menjadi lebih optimal.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan :

- Ketatnya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, terutama masalah sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan lingkungan, baik dari unsur pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.
- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan di wilayah kota, kecamatan dan TPA, sehingga berpengaruh pada belum optimalnya perubahan paradigma pengelolaan sampah di masyarakat.
- Belum memadainya kelengkapan laboratorium lingkungan sehingga berdampak pada kurang intensifnya upaya pengawasan yang dilakukan
- Adanya perilaku sebagian masyarakat dan industri yang belum berwawasan lingkungan

Solusi :

- Perlunya dukungan pemahaman yang sama antar stakeholder. Dengan pemahaman yang sama maka pemberian dan pengawasan izin akan semakin baik dan saling menguatkan dengan izin-izin yang lain. Untuk itu diperlukan upaya mcnggalang pemahaman sinergis antar stakeholder terkait, baik dengan diskusi, advokasi, sosialisasi dan sebagainya.
- Perlu dukungan anggaran lebih di sektor persampahan. Sektor persampahan membutuhkan anggaran lebih karena harus melengkapi sarana dan prasarana yang cukup banyak. Upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah menjadi sistem 3 R (reduce, reuse dan recycle) membutuhkan sarana prasarana yang harus memadai, terpilab di lingkungan masyarakat, operasionalisasi di tingkat pengumpul maupun biaya pengelolaan yang cukup di TPA sanitary landfill.
- Perlu peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan dengan penambahan sarana prasarana, kompetensi personel maupun payung hukum untuk operasionalisasi laboratorium lingkungan hidup. Ke depan diharapkan terbentuknya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dengan kemampuan dan kewenangan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan ini diharapkan upaya pemantauan dan pengawasan lingkungan akan semakin baik dan diengkapi dengan dukungan data kualitas lingkungan yang valid.
- Sosialisasi, asistensi, pemberdayaan masyarakat dan pemberian stimulan sarana pengelolaan persampahan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle) maupun perilaku hidup berwawasan lingkungan lainnya.

9. URUSAN PERTANAHAN

Permasalahan:

- Pensertifikatan tanah aset milik pemerintah daerah, terutama tanah yang berasal dari pembelian pada tahun – tahun yang lalu, terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak penjual (contoh : pajak final, administrasi pertanahan terkait kepindahan pemilik sebelumnya yang tidak dilaksanakan), padahal kewajiban tersebut merupakan salah satu syarat dalam pensertifikatan, sehingga banyak aset pemda yang belum bisa dilaksanakan pensertifikatannya.

- Bangunan aset Pemda utamanya sekolah dan puskesmas pembantu banyak dibangun diatas tanah kas desa

Solusi :

- Bagi tanah-tanah untuk sekolah, administrasi yang mestinya terjadi sebelumnya termasuk pajak dibebankan kepada pihak sekolah dalam hal ini Komite Sekolah, sedangkan pengurusan di BPN diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Dilakukan pendekatan pada desa untuk melepaskan tanahnya dengan memberikan pengganti dalam bentuk yang lain

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
- Kondisi geografis Kabupaten Pacitan sebagian besar sulit dijangkau.
- Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang
- Medan/wilayah di Kabupaten Pacitan sebagian besar sulit dijangkau
- Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang
- Medan/wilayah di Kabupaten Pacitan sebagian besar sulit dijangkau
- Belum tercukupinya kebutuhan blangko KTP-elektronik sesuai kebutuhan dan kurangnya alat untuk mencetak KTP-el (printer)
- Anggapan masyarakat terhadap biaya yang mahal dan sulitnya pengurusan dokumen kependudukan.

Solusi :

- Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan meningkat.
- Mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan desa.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemakai.
- Selalu mengadakan koordinasi dengan pusat dan Dinas Kependudukan Propinsi untuk mendapatkan blangko KTP-elektronik secara maksimal dan printer untuk mencetak KTP-el.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan :

- Belum teralokasikannya anggaran untuk kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan pada tahun 2011.
- Belum optimalnya fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak karena belum di dukung dengan sarana prasarana yang memadai.
- Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga belum dapat di pantau di seluruh wilayah kabupaten Pacitan.
- Data jumlah tenaga kerja dibawah umur belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- Belum adanya format laporan rutin tentang penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang definisi KDRT
- Puskesmas yang mampu tatalaksana KTP/A di kabupaten pacitan baru 5 puskesmas sehingga penanganan kasus tidak optimal
- Minimnya petugas kesehatan terlatih tatalaksana.
- Kurang optimalnya P2TP2A di tingkat desa/kelurahan mengakibatkan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terlayani
- Rendahnya kesempatan kerja perempuan baik dilembaga pemerintah maupun swasta mengakibatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat rendah.

Solusi :

- Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG setiap tahunnya;
- Mengusulkan ke Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk Pembangunan gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Memfungsikan secara optimal pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).
- Mengadakan pendataan ketenagakerjaan bekerjasama dengan dinas tenaga kerja.
- Menyusun format laporan tentang penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
- Mengadakan sosialisasi tentang KDRT

- Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten pacitan untuk mengadakan pelatihan bagi petugas tatalaksana di puskesmas.
- Mengupayakan bersama dengan dinas kesehatan kabupaten pacitan untuk menambah puskesmas tatalaksana.
- Melakukan sosialisasi kepada pejabat desa sampai kecamatan bersamaan dengan LSM dalam penggerakan fungsi P2TP2A sehingga masyarakat memahami fungsi P2TP2A ditingkat desa sebagai sarana memfasilitasi pengaduan masalah masalah perempuan dan anak.
- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam keberpihakan pembangunan terhadap perempuan dan kesetaraan gender.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Permasalahan :

- Kurang efektifnya pemakaian kontrasepsi peserta KB aktif
- Kurangnya jangkauan pembinaan kesehatan reproduksi remaja, sehingga banyak terjadi kawin muda.
- Kurangnya jumlah tenaga fungsional penyuluh KB.
- Keterbatasan biaya operasional bagi kelompok institusi masyarakat pedesaan sehingga mereka bekerja kurang maksimal dalam membantu mensukseskan program KB.
- Petugas lapangan KB jumlahnya semakin berkurang dengan beban wilayah rata-rata 4 desa per petugas sehingga mempengaruhi pencapaian peserta KB.
- Masih tingginya angka drop out bagi peserta KB karena kurangnya pembinaan dari petugas KB.
- Sering terjadinya mutasi kader karena pergi keluar daerah sehingga perlu pelantikan lagi bagi kader
- Bergesernya permintaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi hormonal, yang kurang menguntungkan dari sisi penggarapan program.
- Kurangnya partisipasi pria terhadap program KB yang dikarenakan kurangnya pemahaman para istri tentang penggunaan kotrasepsi pria.

- Terbatasnya ketersediaan ketersediaan alat kontrasepsi pilihan calon akseptor KB
- Masih tingginya pernikahan dibawah usia nikah
- Menurunnya daerah penggarapan program KKB oleh PPKBD dan sub PPKBD karena perubahan dinamika sosial masyarakat
- Kurangnya staf dan petugas lapangan sehingga mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi.
- Tidak optimalnya penanganan kasus oleh tenaga kesehatan terlatih yang dikarenakan Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A baru ada 5 Puskesmas
- Terbatasnya petugas kesehatan terlatih tatalaksana mengakibatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak kurang optimal
- Terbatasnya kesempatan kerja perempuan baik dilembaga pemerintah maupun swasta mengakibatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat rendah.
- Di era keterbukaan masa kini masyarakat cenderung menggunakan kontrasepsi hormonal
- Terbatasnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi pilihan calon akseptor KB.
- Banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini.
- Banyaknya petugas KB yang purna tugas mempengaruhi kinerja organisasi.

Solusi :

- Melaksanakan pembinaan kepada peserta KB agar mereka tetap aktif untuk menjadi peserta KB serta penyediaan kontrasepsi yang cukup bagi mereka yang menggunakan kontrasepsi kurang efektif khususnya bagi peserta KB yang kurang mampu.
- Melakukan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah dan kelompok remaja pedesaan melalui pembentukan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja.
- Mengusulkan tambahan formasi tenaga penyuluh KB kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Mengusulkan alokasi tambahan biaya operasional untuk institusi masyarakat pedesaan kepada pemerintah.
- Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengadaan formasi tenaga petugas lapangan KB.
- Memperkuat program kinerja PPKBD dan sub PPKBD sebagai ujung tombak pelaksana program KB di wilayah.
- Pemantapan kader yang ada agar tidak terjadi mutasi.
- Melakukan promosi besar-besaran melalui berbagai media KIE KB, dan mengoptimalkan petugas lapangan tentang pemilihan penggunaan alat kontrasepsi KB yang cocok, aman dan menguntungkan bagi akseptor.
- Melakukan sosialisasi melalui kelompok Dasa Wisma, PKK dan organisasi wanita lainnya tentang keamanan dan kenyamanan alat kontrasepsi pria.
- Melakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan reproduksi sehat bagi remaja, sekolah dan pesantren melalui media Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-Remaja)
- Memberikan insentif terhadap PPKBD dan Sub PPKBD disetiap bulannya dengan harapan bisa meningkatkan semangat dan gaerah pengabdian dalam penggerakan program KKB
- Berusaha melakukan sosialisasi melalui kelompok Dawis PKK dan organisasi wanita lainnya tentang keamanan dan kenyamanan penggunaan alat kontrasepsi pria.
- Berusaha melakukan promosi besar-besaran melalui berbagai media, dan mengoptimalkan petugas lapangan tentang pemilihan penggunaan alat kontrasepsi KB yang cocok, aman dan menguntungkan bagi akseptor.
- Mengupayakan melakukan pembelanjaan Alat Kontra sepsi KB sesuai sclera masyarakat melalui dana APBD pada setiap tahunnya.
- Melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan melalui sekolah dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan yang lainya melalui kegiatan PIK-Remaja.
- Berupaya selalu memberikan insentif terhadap PPKBD dan sub PPKBD disetiap bulannya melalui dana APBD.
- Mengajukan usulan penambahan staf dan petugas lapangan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan
- Melakukan koordinasi dengandinas kesehatan untuk mengadakan pelatihan bagi petugas tatalaksana di puskesmas.

- Berkoordinasi dengan Dinkes untuk berupaya menambah puskesmas yang mampu tatalaksana
- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam keberpihakan pembangunan terhadap perempuan dan kesetaraan gender.
- Melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Pokja PKK Kabupaten maupun Kecamatan tentang program KB mantap dan Kesehatan Reproduksi.
- Mengajukan penganggaran belanja Alat kontrasepsi KB melalui musyawarah rencana pembangunan di setiap tahunnya.
- Melakukan gelar bakti remaja dan pramuka Saka Kencana untuk mensosialisasikan program PIK-Remaja dalam upaya pendewasaan usia pernikahan.
- Berupaya mengajukan penambahan staf dan petugas lapangan kepada pemerintah Kabupaten Pacitan

13. URUSAN SOSIAL

Permasalahan :

- Meningkatnya permasalahan sosial yang disebabkan karena bersumber pada kemiskinan.
- Banyaknya masalah sosial yang masih ditangani secara parsial.
- Masih terbatasnya anggaran untuk menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Masih terbatasnya sarana pra sarana dan skill SDM dalam penanganan/penanggulangan bencana.
- Belum maksimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia terlantar di luar panti.
- Belum tersedianya petugas sosial yang profesional tingkat kecamatan yang menangani permasalahan khusus PMKS yang memadai, akibatnya data PMKS di tingkat Desa/Kecamatan belum tersedia secara lengkap dan akurat.
- Tingkat kesadaran, kepedulian masyarakat dan keluarga penyandang cacat masih relatif rendah, akibatnya para penyandang cacat belum dapat di berdayakan secara maksimal.
- Masih terbatasnya sarana, prasarana dan skill SDM dalam penanganan/penanggulangan bencana.
- Belum maksimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia terlantar di luar panti.

- Belum tersedianya tenaga ahli bagi penyandang cacat, baik yang produktif maupun non produktif termasuk anak.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepedulian para penyandang cacat
- Tidak adanya tempat penampungan para gelandangan pengemis, orang terlantar dan orang gila
- Orang terlantar yang sakit dan dirawat di RSUD namun pembiayaan masih belum jelas, sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab
- Banyaknya penderita cacat yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda.
- Semakin banyaknya para penderita HIV/AIDS dan pecandu Narkoba
- Ada beberapa kejuruan yang telah memiliki peralatan dan mesin tetapi belum ada Instruktur dan workshop

Solusi :

- Mengusulkan kepada pemerintah Pusat dan Propinsi menambah alokasi anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar (perumahan), pendidikan bagi penduduk miskin.
- Penanganan terpadu secara sektoral dan masyarakat.
- Mengusulkan kepada pemerintah Pusat dan Propinsi menambah alokasi anggaran untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Mengusulkan kepada pemerintah Pusat dan Propinsi menambah alokasi anggaran untuk peningkatan skill dan penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan lanjut usia terlantar.
- Mengusulkan kepada pemerintah untuk pengadaan petugas sosial kecamatan yang profesional dan memadai untuk menangani masalah PMKS.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga penyandang cacat terhadap pentingnya pengakuan, perlakuan, kemampuan dan pemberdayaan kepada penyandang cacat agar mereka dapat hidup secara layak dalam masyarakat.

- Mengusulkan kepada pemerintah Pusat dan Propinsi menambah alokasi anggaran untuk peningkatan skill dan penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan lanjut usia terlantar.
- Mengusulkan kepada pemerintah Pusat dan Propinsi mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendayagunaan bagi para penyandang cacat dan instruktur bagi penyandang cacat.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pengakuan terhadap kemampuan penyandang cacat yang telah memiliki keterampilan untuk hidup normal (bersosialisasi).
- Orang terlantar diberi bantuan uang /biaya transport kembali ketempat asalnya
- Dinas Sosial harus mengurus jenazah dan pemakamannya namun minimnya anggaran
- Perlu adanya pelatihan dan bantuan peralatan sesuai dengan kecacatannya
- Perlu adanya sosialisasi secara kontinyu tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Permasalahan :

- Masih rendahnya kualitas Angkatan kerja yang berakibat pada rendahnya daya saing dalam mengisi/memperoleh peluang kerja. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat keterampilan kerja.
- Masih terbatas dan belum memadainya sarana dan prasarana BLK yang ada.
- Belum maksimalnya pengembangan Lembaga Latihan Swasta (LLS).
- Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh/pekerja, sehingga sangat rentan terhadap timbulnya perselisihan hubungan industrial.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan dan pekerja terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan alat K3.
- Terbatasnya tenaga professional untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh.

- Terbatasnya sarana mobilisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan
- Belum maksimalnya pengembangan Lembaga Latihan Swasta (LLS).
- Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh/pekerja, sehingga sangat rentan terhadap timbulnya perselisihan hubungan industrial.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan dan pekerja terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan alat K3.
- Terbatasnya tenaga professional untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh.
- Terbatasnya sarana mobilisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan.
- Tenaga penjaga malam selama 5 tahun sebanyak 2 orang masih berstatus Kontrak
- Banyaknya lulusan SMA/SMK yang ingin bekerja tapi lapangan pekerjaan yang sesuai tidak ada mencukupi
- Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi

Solusi :

- Mengusulkan kepada pemerintah menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan keterampilan kerja bagi Angkatan kerja produktif.
- Mengusulkan kepada pemerintah pusat menambah alokasi anggaran untuk pengadaan sarana, prasarana BLK yang memadai dan menambah tenaga Instruktur.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pelatihan swasta terhadap perlunya peberdayan lembaga pelatihan bagi masyarakat.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan alat K3.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah tenaga fungsional bidang Pembinaan dan perlindungan Hubungan Industria.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pelatihan swasta terhadap perlunya peberdayan lembaga pelatihan bagi masyarakat.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja.

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan alat K3.
- Mengusulkan kepada pemerintah menambah tenaga fungsional bidang Pembinaan dan perlindungan Hubungan Industrial.
- Memanfaatkan Sumberdaya yang ada semaksimal mungkin
- Honor dimasukan dalam kegiatan pelatihan
- Mengadakan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya Manusia
- Pengembangan pasar kerja dan perluasan lapangan kerja

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Permasalahan :

- Belum terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi KUMKM.
- Masih kurangnya promosi Produk unggulan KUMKM.
- Belum optimalnya pelaksanaan Program OVOP dan Penumbuhan Wirausaha Baru
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola Koperasi tentang perkoperasian
- Banyaknya proposal KUMKM yang tidak dapat dilayani
- Kurangnya dana operasional untuk pelayanan kepada KUMKM sehingga kurang optimalnya fasilitasi kepada KUMKM
- Perlu fasilitasi untuk kelengkapan Ruang Pamer dan dan pelaksanaan pameran Produk KUMKM
- Belum tercapainya Program OVOP dan Penumbuhan Wirausaha Baru
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola Koperasi tentang perkoperasian
- Banyaknya proposal KUMKM yang belum dapat dilayani
- Kurangnya dana operasional untuk pelayanan kepada KUMKM sehingga kurang optimalnya fasilitasi kepada KUMKM
- Perlu fasilitas untuk kelengkapan Ruang Pamer dan dan pelaksanaan pameran Produk KUMKM
- Belum tercapainya Program OVOP dan Penumbuhan Wirausaha Baru
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola Koperasi tentang perkoperasian
- Banyaknya proposal Pengajuan Dana bergulir KUMKM yang tidak dapat dilayani
- Kurangnya dana operasional untuk pelayanan kepada KUMKM sehingga kurang optimalnya fasilitasi kepada KUMKM

- Perlu fasilitas untuk kelengkapan gedung Pusat layanan Usaha Terpadu sebagai Pusat layanan bagi Koperasi Usaha mikro kecil dan Menengah
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola Koperasi utamanya usaha sector riil
- Banyaknya proposal Pengajuan Dana bergulir KUMKM yang tidak dapat dilayani
- Kurangnya dana operasional untuk pelayanan kepada KUMKM sehingga kurang optimalnya fasilitasi kepada KUMKM
- Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM

Solusi :

- Terealisasinya sebagian fasilitas kredit kepada KUMKM
- Pelaksanaan Pameran produk unggulan
- Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha dalam rangka menggali potensi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Pelaksanaan diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi
- Terealisasinya fasilitas kredit kepada KUMKM
- Pelaksanaan kunjungan lapangan kepada KUMKM
- Pelaksanaan Pameran produk unggulan
- Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha dalam rangka menggali potensi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Pelaksanaan diklat bagi pengurus, pengawas koperasi
- Terealisasinya sebagian fasilitas kredit kepada KUMKM
- Pelaksanaan kunjungan lapangan kepada KUMKM
- Pelaksanaan Pameran produk unggulan
- Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha dalam rangka menggali potensi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Pelaksanaan diklat bagi pengurus, pengawas koperasi
- Mengaktifkan penagihan kepada para penunggak dana bergulir
- Mengusulkan sarana untuk mengadakan penagihan kunjungan dan pembinaan kepada KUMKM
- Mengusulkan sarana kerja untuk gedung PLUT
- Mengikutkan sarana kerja untuk gedung PLUT KUMKM
- Mengaktifkan penagihan kepada para penunggak dana bergulir
- Mengusulkan sarana untuk mengadakan penagihan kunjungan dan pembinaan kepada KUMKM
- Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan baik untuk SDM aparatur maupun SDM Koperasi dan UMKM

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

Permasalahan :

- Target realisasi investasi sulit dicapai karena permasalahan infrastruktur yang terbatas dan belum ditetapkannya regulasi daerah tentang investasi.
- Karena adanya perubahan kebijakan tentang klasifikasi PMDN sehingga angka capaian terlalu tinggi dari yang ditargetkan.
- Untuk capaian daya serap tenaga kerja mengalami penurunan drastis karena jumlah perusahaan PMA/PMDN semakin banyak sedangkan jumlah tenaga kerja yang beragam
- Dengan bergabungnya urusan penanaman modal ke dalam kantor pelayanan perijinan berdampak pada berubahnya bentuk kelembagaan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pacitan No 5 tahun 2012, dalam implementasinya berlaku mulai tahun 2013 dengan format yang agak berbeda, sehingga di butuhkan waktu untuk saling memadukan semua konsep di dua lembaga yang sudah berjalan selama ini baik dari segi anggaran, SDM, kinerja maupun sarana prasarana
- Adanya perubahan ketentuan pokok dan regulasi di tingkat pusat menyulitkan implementasi di daerah.
- Belum sinergisnya instansi pembina bidang Penanaman Modal di tingkat Pusat, sehingga beberapa aturan tumpang tindih dan berbeda
- Kompleksnya pengelolaan bidang penanaman modal mengingat obyek sasaran terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga ketentuan yang ada sebagian besar masih bersifat sektoral.
- Konsistensi kerjasama antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah dengan Swasta belum maksimal
- Promosi kurang menjangkau daerah yang lebih luas
- Keterkaitan unit teknis lainnya masih tinggi sehingga pelayanan perijinan penanaman modal sering mengalami hambatan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur perijinan
- Kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sebagai legalitas usaha masih rendah
- Keterbatasan SDM terutama pada unit pelayanan
- Perubahan regulasi dan aturan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
- Regulasi bidang penanaman modal utamanya pelayanan terpadu satu pintu diatur oleh BKPM dan Kemendagri

- Regulasi bidang Penanaman Modal utamanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur oleh BKPM dan Kemendagri;
- Realisasi investasi belum mencapai target RPJMD;
- Regulasi insentif masih bersifat umum;
- Belum adanya penetapan zona/ kawasan peruntukan industri
- Banyaknya perubahan regulasi antara lain |UU 23/2014 yang mengakibatkan perubahan kewenangan yang berdampak pada investasi dan proses perizinan
- Adanya Perda yang belum disesuaikan dengan regulasi yang baru
- Adanya beberapa Perda yang belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dan juklak (contoh : ketentuan pemberian keringanan retribusi izin gangguan, persyaratan pendirian toko modern)
- SOP dan Standard Pelayanan yang belum sempurna
- Komitmen dari stakeholder belum optimal sehingga dalam rangka Penyelenggara PTSP yang berdampak terhadap kualitas & kualitas layanan
- Adanya Perda yang belum disesuaikan dengan regulasi yang baru
- Keterbatasan Jumlah & Kualitas SDM Terhadap Rasio Perizinan sehingga Tingkat Layanan belum terlaksana ,secara Optimal
- SDM belum profesional utamanya dalam layanan dan penggunaan teknologi informasi sehingga pemanfaatan aplikasi yang ada masih terhambat
- Terbatasnya sarana dan prasarana antara lain gedung (ruang arsip, ruang display, gudang belum ada), kendaraan operasional lapangan, hardware & software.

Solusi :

- Pemetaan potensi unggulan.
- Perbaiki regulasi dan kemudahan investasi.
- Perbaiki infrastruktur serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri
- Merevisi target sesuai dengan klarifikasi PMDN yang baru
- Penggabungan kelembagaan ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Dalam indikator capaian RPJMD bidang investasi unsur pelayanan dan indikator SPM belum tercantum, sehingga nantinya akan dicantumkan dalam review RPJM yang saat ini

dalam proses pembahasan, hal ini dimaksudkan agar capaian target kinerja bisa terukur dengan optimal.

- Menyatukan langkah guna kesamaan visi, misi dan persepsi sehingga dapat menyikapi output regulasi dari Pemerintah Pusat dalam implementasinya di Kabupaten Pacitan.
- Selalu koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam penyusunan regulasi kebijakan sehingga dapat memberikan masukan yang lebih bermanfaat.
- Penyatuan langkah bersama pimpinan dalam mengarahkan gerak kebijakan penanaman modal
- Menyusun dan mengumpulkan data tentang daya tarik serta peluang investasi
- Berupaya mengembangkan inovasi produk unggulan daerah sehingga layak dipamerkan keluar daerah.
- Penyusunan kluster industri potensi daerah
- Penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
- Penguatan SDM pelaksana pelayanan.
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
- Mengoptimalkan tenaga yang ada melalui rotasi pegawai dan penyegaran pada posisi-posisi tertentu serta pemerataan tugas dan Pendelegasian wewenang secara proposional
- Koordinasi ke BKPM dan Kemendagri terkait dengan Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal
- Melakukan konsultasi ke BPM Prov, BKPM dan Kemendagri (Ditjen Bangda & Ditjen PUM) serta melakukan evaluasi terhadap jenis izin dan SPP
- Melakukan konsultasi ke BPM Prov, BKPM, dan Kemendagri
- Perlu peningkatan kegiatan promosi dalam APBD dan koordinasi dengan SKPD terkait
- Diatur dalam tata ruang
- Konsultasi untuk izin yang dilaksanakan Propinsi
- Perlu ditindaklanjuti oleh SKPD yang membidangi
- Melakukan perubahan SOP dan SP secara berkala sesuai dengan regulasi
- Perlunya dilakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan jenis izin
- Melakukan peningkatan SDM melalui kegiatan pembinaan dan diklat yang diusulkan dalam APBD

17. URUSAN KEBUDAYAAN

Permasalahan :

- Belum meratanya bantuan sosial kemasyarakatan bagi organisasi kesenian
- Belum adanya gedung kesenian yang representatif untuk kegiatan berkesenian
- Adanya gedung museum sebagai penyimpanan benda-benda koleksi museum yang kondisinya rusak berat
- Belum meratanya bantuan sosial kemasyarakatan bagi organisasi kesenian
- Belum adanya gedung kesenian yang representatif untuk kegiatan berkesenian
- Gedung Museum yang ada di Kabupaten Pacitan mengalami rusak berat sehingga koleksi benda-benda museum saat ini masih disimpan.
- Kurang adanya peningkatan kualitas bagi pelaku seni yang ada di daerah
- Kurang optimalnya pendataan seni budaya pada kecamatan-kecamatan, sehingga sering data yang diminta dinas untuk di lengkapi di kecamatan tapi data tersebut tidak kembali ke Dinas

Solusi :

- Diusulkan pada kegiatan tahun berikutnya, baik lewat anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN
- Mengusulkan bantuan sosial kemasyarakatan bagi organisasi kesenian pada tahun 2014
- Mengusulkan bantuan pembangunan gedung pada anggaran APBD Propinsi dan APBN
- Mengusulkan perbaikan museum melalui anggaran APBD I
- Untuk meningkatkan potensi maupun kreatifitas para pelaku seni di daerah melalui kegiatan yang ada dilakukan kunjungan ke sanggar sanggar yang ada di daerah ;
- Dengan keterbatasan yang ada dari Dinas Budparpora melakukan pendataan ke kecamatan-kecamatan akan tetapi belum optimal dikarenakan terbatasnya petugas yang ada di Dinas Budparpora

18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Permasalahan :

- Kurangnya sarana prasarana guna mendukung atlet berprestasi
- Kurangnya pembinaan dan penghargaan terhadap atlet yang berprestasi

- Terbatasnya kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan
- Kurangnya peran serta pemuda dalam pelaksanaan pembangunan
- Belum efektifnya pembinaan pemuda
- Belum dilibatkan secara optimal pola kemitraan pemuda baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dalam program pemerintah
- Merosotnya nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme
- Rendahnya pendidikan politik bagi generasi muda
- Merosotnya nilai-nilai patriotism dan nasionalisme ;
- Belum dilibatkan secara optimal pola kemitraaan pemuda baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dalam program pemerintah
- Jumlah sarana dan Prasarana Olah raga di Kabupaten Pacitan semakin meningkat, akan tetapi tidak disertai dengan pengelolaan yang optimal
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan gedung pemuda
- Beberapa cabang Olah Raga belum memiliki fasiiitas latihan sendiri yang memnuhi standar
- Belum populernya olahraga rekreasi masyarakat di Daerah
- Jumlah aset dan luas area belum seimbang dengan jumlah personal yang bertanggung jawab dibidang kebersihan dan keamanan
- Penataan instalasi listrik dan pencahayaan di gelanggang olah raga belum sesuai dengan kebutuhan pengguna ;
- Air dilingkungan gelanggang olah raga dan stadion berwarna kuning dan berbau tanah

Solusi :

- Mengusulkan kepada pemerintah pusat maupun propinsi terkait penambahan sarana dan prasarana olah raga
- Mengusulkan kepada pemerintah pusat maupun propinsi terkait dengan pembinaan dan penghargaan serta menambah alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya
- Membangun system agar mampu membentuk karakter pemuda yang maju, mandiri dan tanggap menghadapi pernbahan zaman, dan perkembangan iptek dengan melakukan pembinaan dan pelatihan dikalangan pemuda
- Mengoptimalkan peran serta pemuda sebagai sumber daya pembangunan yang diimbangi dengan berbagai upaya untuk

- meningkatkan kualitas pemuda karena pe
aset pembangunan, sehingga perlu dikelola :
- Membangun kemitraan dengan pihak swast
 - Berupaya mengembalikan dan menanamk
patriotisme
 - Berupaya mengembalikan dan membangkitkan jiwa nasional
dan patriotisme di kalangan pemuda dengan melibatkan
dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
yang outputnya pada nilai-nilai perjuangan, semangat 45,
napak tilas dan lain-lain.
 - Melibatkan peran Pemuda sebagai mitra pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Kabupaten
Pacitan agar pemuda dapat maju dan mandiri serta tanggap
dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
 - Segera merencanakan perubahan Regulasi yang mengatur
tentang pengelolaan lapangan olah raga.
 - Mengajukan bantuan berupa kelengkapan sarana dan
prasarana Gedung Pemuda ke Menpora.
 - Mengoptimalkan pemakaian fasilitas olahraga yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 - Diadakan sosialisasi melalui sering diadakannya kegiatan
pertandingan olahraga masyarakat baik ditingkat Kecamatan
maupun Kabupaten
 - Memaksimalkan personil yang ada yaitu 4 orang digelandang
olah raga dan stadion, dan 1 orang di gedung gasibu.
 - Direncanakan untuk diadakan penataan ulang instalasi dan
tata pencahayaan sesuai dengan situasi gedung. Untuk daya
sudah mencukupi yaitu 23 ribu watt
 - Ketika ada event besar selalu harus mendatangkan air bersih
dari PDAM

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Permasalahan :

- Kurangnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
- Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan bencana
khususnya kebakaran
- Keterbatasan jumlah tenaga yang menangani penertiban
masyarakat
- Kurangnya sarana komunikasi untuk mendukung program
pencegahan dini penyakit masyarakat (PEKAT)

- Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap bencana
- Kesulitan dalam membentuk Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
- Program pelayanan administrasi perkantoran permasalahannya Masih kurangnya sarana prasarana Lap Top dan Komputer
- Program Wawasan kebangsaan permasalahannya adalah Kurang kesadaran tentang HAM dan kurang koordinasi antar lembaga
- Program Pendidikan Politik Masyarakat permasalahannya Kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan lembaga kemasyarakatan dan ormas kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
- Gedung Kantor / Tempat Parkir yang kurang memadai
- Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap pemilu semakin menurun.
- Pelaporan keberadaan Ormas, LSM dan OKP kurang tertib.
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas personil lembaga.
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- Pelaporan keberadaan Ormas, LSM dan OKP kurang tertib

Solusi :

- Dilaksanakan Pembinaan secara berkala tentang tugas pokok linmas.
- Mengusulkan penambahan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran.

- Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana komunikasi pendukung program pencegahan dini penyakit masyarakat (PEKAT) di tahun berikutnya
- Mengadakan Sosialisasi pencegahan dan mitigasi bencana
- Mengadakan sosialisasi penyadaran tanggap bencana
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.
- Program Pelayanan administrasi perkantoran adalah pengadaan Lap Top dan Komputer
- Program Wawasan kebangsaan adalah dengan mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait tentang taret dan sasaran sesuai dengan peran dan kedudukannya.
- Program Pendidikan Politik Masyarakat adalah dengan mendata kembali organisasi yang ada serta memberitahukan secara tertulis kepada pengurus organisasi yang telah terdaftar untuk selalu melaporkan keberadaan organisasi maupun kegiatannya secara berkala.
- Pindah Kantor baru yang lebih memadai sehingga meningkatkan Kinerja Aparatur
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lebih ditingkatkan.
- Dengan mendata kembali organisasi yang ada serta memberitahukan secara tertulis kepada pengurus organisasi yang telah terdaftar untuk selalu melaporkan keberadaan organisasi maupun kegiatannya secara berkala kepada Badan Kesbang
- Penambahan kualitas dan kuantitas SDM.
- Mendorong sinergisitas/keterpaduan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan penanggulangan bencana.
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

- Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan baik saat bencana maupun pasca bencana.
- Mendata kembali organisasi yang ada serta memberitahukan secara tertulis kepada pengurus organisasi yang telah terdaftar untuk selalu melaporkan keberadaan organisasi maupun kegiatannya secara berkala kepada Badan Kesbang Pol Kab. Pacitan

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Permasalahan :

- Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
- Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.
- Komitmen dari dinas teknis tentang pentingnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) belum optimal
- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang masih dikelola 2 (dua) SKPD menyebabkan kesulitan dalam penghimpunan data ditambah lagi ada SKPD yang mengirim peserta diklat tanpa melalui Badan Kepegawaian Daerah dan setelah selesai tidak melaporkan hasilnya.
- Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan pembinaan baik secara umum maupun pembinaan personal, namun Pelanggaran Disiplin masih tinggi.
- Sarana dan prasarana yang kurang mendukung
- Adanya aturan yang jelas tentang kewajiban obyek wajib pajak
- Kurangnya pemberitaan tentang obyek pariwisata di Pacitan yang berimbas pada kurang maksimalnya jumlah pengunjung di Pacitan
- Kurangnya penghargaan kepada obyek pajak yang mematuhi aturan dan prosedur

- Pejabat Struktural yang direncanakan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural belum mendapat panggilan dari Badan Diklat Provinsi sehingga berpengaruh pada capaian RPJMD.
- Banyak pegawai yang akan purna tugas, sedangkan rekrutmen pegawai tidak ada sehingga akan berpengaruh pada pelayanan

Solusi :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, penerimaan CPNSD dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
- Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid.
- Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis tentang pentingnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
- Dalam hal pelaksanaan Diklat untuk ke depannya akan dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi, dan dalam perencanaan diklat juga akan di koordinasikan dengan instansi terkait.
- Badan Kepegawaian Daerah akan terus melakukan pembinaan baik pembinaan kepegawaian maupun pembinaan secara personal untuk menekan angka pelanggaran disiplin untuk tahun berikutnya.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana terutama akses jalan yang baik, yang menghubungkan wilayah di Kabupaten Pacitan,
- Optimalisasi Target obyek pajak harus lebih rasional, artinya Pemerintah Daerah harus dapat melihat kemampuan obyek pajak

- Pemerintah Pacitan harus secara optimal mengekspos keberadaan obyek-obyek pariwisata, yang di harapkan nantinya akan menaikkan jumlah wisatawan
- Memberikan intensif bagi Obyek pajak yang Patuh akan peraturan dan prosedur yang berlaku
- Untuk tahun 2016 akan memberangkatkan pejabat eselon II yang seharusnya mengikuti
- Merencanakan Seleksi Penerimaan CPNS untuk tahun berikutnya untuk memenuhi kebutuhan PNS yang kosong karena PNS yang purna tugas.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Permasalahan :

- Kurangnya kapasitas sumber daya manusia petugas pengumpul data dari SKPD terkait
- Terbatasnya bantuan anggaran dari propinsi untuk pengadaan cadangan pangan
- Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat yang belum mencerminkan pangan 3BA (beragam, bergizi, berimbang dan aman) dan belum adanya penganekaragaman konsumsi pangan dalam menu sehari-hari.
- Peran Dewan Ketahanan Pangan Belum Optimal
- Harga sembilan bahan pokok yang cenderung naik
- Penangan daerah rawan pangan belum memenuhi target RPJM
- Minimnya input berupa dana terutama APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendukung SPM dan penyumbang indikator kinerja yang tidak didanai APBN maupun APBD provinsi.
- Kurangnya personil di lapangan sehingga kesulitan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan sehingga dirangkap oleh personil Kantor Ketahanan Pangan sendiri.
- Kesulitan mengumpulkan data-data di lapangan terutama yang tidak didanai dan harus lintas SKPD, karena data yang dimaksud belum tentu tersedia atau bersifat temporer/ tidak rutin.

Solusi :

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi dan langkah tindak.
- Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan ke pemerintah propinsi.

- Melakukan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pangan 3BA serta pemanfaatan tanaman spesifik lokal sebagai pangan alternatif.
- Penyusunan data peta rawan pangan di tahun 2015
- Melakukan Rapat Koordinasi minimal 2 kali dalam satu tahun
- Intervensi daerah rawan pangan ditingkat (lokasi kegiatan di prioritas daerah rawan pangan) dan memperbaiki analisis pemetaan daerah rawan pangan.
- Kegiatan dibiayai dengan anggaran yang kecil sehingga kurang mencapai target.
- Pembagian tugas di lapangan antara personil Kantor Ketahanan Pangan dan personil SKPD lain.
- Menggunakan proyeksi data sesuai kesepakatan bersama.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Permasalahan :

- Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
- Dengan telah selesainya fasilitator kabupaten dan kecamatan masih ada kegiatan pembangunan yang belum selesai karena menunggu penggantian specimen.
- Belum adanya kejelasan tentang kelembagaan UPK.
- Perlu adanya pendampingan lagi guna pengelolaan aset yang dimiliki oleh PNPM-MPd yaitu Aset Sarana Prasarana dan dana simpan pinjam bergulir.
- Kegiatan Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (LKD/K)
- Peran KPM belum optimal di desa
- Belum memfungsikan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam perencanaan pembangunan di desa.
- Sangat terbatasnya dana dalam mendukung kegiatan Puncak Peringatan BBGRM Tingkat Kabupaten Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- Kurang Optimalnya Peran Pemerintah Desa dan lembaga desa dalam mendukung program PMT-AS bagi Anak sekolah

Solusi :

- Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 414.21/302/PMD tentang Pengendalian penyelesaian kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2014, telah diadakan sosialisasi dalam rangka pengendalian kelanjutan program PNPM-MP guna pengamanan aset yang dimiliki.

- Telah diadakan pelatihan terhadap KPM Kegiatan Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (LKD/K)
- Telah diusulkan penambahan dana Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dalam perubahan anggaran namun masih belum tercukupi
- Telah diadakan sosialisasi dalam mendukung kegiatan PMT-AS.

23. URUSAN STATISTIK

Permasalahan :

- Data dari SKPD untuk penyusunan Profil Statistik Kabupaten Pacitan, sebagian besar belum masuk sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akibatnya penyelesaian kegiatan mengalami keterlambatan.

Solusi :

- Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan

24. URUSAN KEARSIPAN

Permasalahan :

- Terbatasnya ruangan Depo Arsip, tidak menampung volume berkas / box arsip in aktif yang disimpan (kurang standar ANRI)
- Kurangnya kualitas SDM kearsipan dan kuantitas petugas pengelola arsip
- Masih rendahnya kualitas SDM pengelola kearsipan pada SKPD.
- Program Arsip Masuk Desa (AMD) berjalan lambat, sampai tahun 2012 pelaksanaannya mencapai 95 desa/kelurahan atau 55,55% dari jumlah 171 desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan
- Gedung Depo Arsip perlu penambahan ruangan mengingat volume arsip semakin bertambah
- Keterbatasan SDM Kearsipan.

Solusi :

- Penataan dan penyimpanan berkas/ box arsip, meskipun kurang memenuhi standar diupayakan ditempatkan pada tempat yang masih kosong
- Memanfaatkan tenaga / petugas yang ada, apabila ada kesempatan untuk mengikuti bintek kearsipan, perlu penambahan petugas pengelola arsip di Depo Arsip yang memadai
- Diadakan Bintek petugas pengelola kearsipan SKPD setiap tahun

- Pelaksanaan Bimtek AMD bagi sekretaris desa / kelurahan, secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
- Memanfaatkan tempat / ruangan yang ada
- Mengadakan Bimbingan dan pembinaan teknis terhadap staf

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan :

- Masyarakat umumnya belum mengenai adanya lembaga komunikasi sosial yang berbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ;
- Keterbatasan tenaga teknis dalam pembinaan KIM.
- Belum dapat mengikuti semua agenda dalam Pekan KIM Jatim
- Belum adanya regulasi terkait perijinan usaha wartel/warnet di Kabupaten Pacitan sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
- Adanya stasiun radio/televisi yang belum memiliki perijinan karena keterbatasan jumlah kanal frekuensi yang dialokasikan pada wilayah Kabupaten Pacitan
- Pengelolaan data elektronik yang masih bersifat parsial pada SKPD masing masing sehingga belum bisa diakses oleh sesama SKPD sendiri maupun oleh masyarakat
- Belum adanya regulasi terkait perijinan usaha wartel/warnet di Kabupaten Pacitan sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
- Adanya stasiun radio/televisi yang belum memiliki perijinan karena keterbatasan jumlah kanal frekuensi yang dialokasikan pada wilayah Kabupaten Pacitan
- Pengelolaan data elektronik yang masih bersifat parsial pada SKPD masing - masing sehingga belum bisa diakses oleh sesama SKPD sendiri maupun oleh masyarakat.
- Topografi wilayah yang berbukit terjal sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi melalui jaringan seluler maupun internet

Solusi :

- Terus meningkatkan sosialisasi, pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Melibatkan tenaga teknis seperti PPL dsb
- Memilih agenda (perlombaan) sesuai kemampuan
- Perlu disusun regulasi terkait perijinan usaha wartel/warnet di Kabupaten Pacitan sehingga memudahkan melakukan pengawasan dan pengendalian

- Mengajukan alokasi kanal frekuensi kepada pemerintah pusat supaya stasiun radio/televisi memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Pembangunan infrastruktur teknologi informatika yang meliputi; pusat data (data center), akses internet ke masyarakat (public) dan pengembangan sistem informasi yang dikelola secara terpadu.
- Perlu disusun regulasi terkait perijinan usaha wartel/waruet di Kabupaten Pacitan sehingga memudahkan melakukan pengawasan dan pengendalian,
- Mengajukan alokasi kanal frekuensi kepada pemerintah pusat supaya stasiun radio/televisi memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Pembangunan infrastruktur teknologi informatika yang meliputi; pusat data (data center), akses internet ke masyarakat (public) dan pengembangan sistem informasi yang dikelola secara terpadu.
- Untuk dapat memperluas jaringan internet dapat menjangkau perlu pembangunan infrastruktur transmisi jaringan melalui penambahan menara telekomunikasi atau melalui jalur kabel (*fiber optic*).

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Permasalahan :

- Kurang standar nasional, ruang Perpustakaan Umum Kabupaten Pacitan
- Koleksi buku bahan pustaka, kurang up to date
- Pemustaka belum menunjukkan peningkatan / secara rutin berkunjung ke Perpustakaan
- Pembentukan kelembagaan perpustakaan desa / kelurahan belum maksimal, mengingat desa/kelurahan kurang memperhatikan dan memahami Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan, sedangkan SKPD belum secara maksimal melakukan perpustakaan khusus di masing-masing SKPD (Ruang Perpustakaan atau Sudut Baca)
- Para pengunjung perpustakaan / pemustaka baik dewasa, remaja dan anak-anak kurang nyaman dan keterbatasan ruang baca (luasan perpustakaan umum 101 M²)
- Sangat minim sekali penambahan koleksi bahan pustaka dan kurang up to date untuk memenuhi kebutuhan pemustaka
- Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Keterbatasan Unit Perpustakaan Keliling hanya 1 (satu) Unit sehingga pelayanan kurang maksimal.

Solusi :

- Menempati dan memanfaatkan ruangan yang ada, merencanakan untuk dilakukan rehabilitasi.
- Memberikan pelayanan dengan memanfaatkan koleksi buku bahan pustaka yang ada
- Mengadakan promosi, memberikan brosur / leaflet ke sekolah dan pelayanan perpustakaan keliling
- Secara berkala mengadakan pembinaan kepada Desa/Kelurahan, dan berusaha pendekatan dengan Perpustnas mengadakan bantuan buku koleksi bahan pustaka untuk desa/kelurahan bertahap, sedangkan perpustakaan khusus diadakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD / Satker.
- Untuk menampung dan kenyamanan pemustaka, perpustakaan umum kabupaten pacitan memberikan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu (pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB)
- Berusaha untuk meminta bantuan / hibah koleksi bahan pustaka kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi serta pihak ketiga, agar ada penambahan koleksi bahan pustaka
- Mengadakan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap staf
- Mendorong dan memelihara sarana secara efisien dan efektif.

B. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERTANIAN

Permasalahan :

- Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- Pemahaman Perangkat desa yang beragam, yang menyebabkan beragamnya tingkat partisipasi
- Pola pemeliharaan ternak yang mengarah ke model kereman' yang menyulitkan peternak dalam membawa ternaknya
- Sulitnya menentukan lokasi pengumpulan ternak akibat terbatasnya lahan terbuka
- Penerapan SLPTT dan inovasi teknologi pertanian lainnya belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan atau rekomendasi
- Relatif masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan baik petugas lapang maupun kabupaten dalam pengambilan, pengumpulan dan pengolahan dan pengolahan data produksi

- Kurang seimbangnya jumlah petugas baik di kabupaten maupun lapangan dengan kegiatan yang dialokasikan setiap tahun
- Beberapa perilaku/kebiasaan petani dalam penanganan pasca panen masih belum sesuai dengan tuntutan SOP
- Usaha chip cassava kurang berjalan dengan baik karena harga bahan baku tidak seimbang dengan harga jual dan faktor permodalan
- Kualitas produk makanan olahan masih belum memenuhi standar pasar.
- Posisi tawar petani masih rendah sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan petani.
- Pengolahan industri perkebunan belum dilaksanakan secara optimal.
- Keterbatasan permodalan petani untuk pemeliharaan tanaman perkebunan yang ditanam pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan berimbas pada rendahnya produksi hasil perkebunan.
- Agroiinput, distribusi belum mendekati lokasi dan penggunaan pupuk yang belum berimbang
- SDM penyuluh / petugas lapang semakin berkurang karena pensiun dan pindah struktural
- JITU banyak yang rusak sehingga butuh perbaikan
- Rumah potong hewan (RPH) sarana dan prasarananya masih belum lengkap
- Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian setiap tahunnya meningkat baik dipertanian dan pedesaan.
- Menurunnya sumber daya air baik kualitas dan kuantitasnya
- Pemanfaatan potensi lahan kering belum optimal
- Kemandirian kapasitas kelembagaan tani (Kelompok tani, Gapoktan) belum berkembang
- Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik yang menyebabkan kerusakan sifat fisika-kimia tanah
- Produk olahan hasil pertanian belum memiliki daya saing karena dipengaruhi oleh aspek higienis dan packing
- Penyelenggaraan penyuluhan belum optimal
- Ketersediaan pakan hijauan terkadang sulit diperoleh
- Usaha ternak sebagian besar masih skala kecil
- Sumber daya modal peternak relative rendah
- Pengetahuan peternak tentang reproduksi ternak masih terbatas.

- Penguasaan teknologi pakan di tingkat peternak yang masih rendah.
- Masih sempitnya cakupan pemasaran produk peternakan
- Pengelolaan usaha tani hortikultura dan tanaman pangan belum optimal.
- Adanya penyakit yang menyerang ternak (Brucellosis dan AI)
- Kesadaran masyarakat/pedagang tentang bahan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal masih kurang
- Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif
- Kurangnya sarana pengawasan peredaran BAH, belum ada petugas check point
- Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH
- Kebutuhan Infrastruktur pertanian (JITUT/JUT/Irigasi permukaan) masih tinggi.
- Distribusi pupuk yang belum baik
- Penggunaan pupuk organik masih kurang
- Sesuai kebijakan Kementerian Pertanian diharapkan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengampu satu desa. Pada tahun 2015 jumlah PPL PNS yang ada 47 orang sedangkan terdapat 171 desa/kelurahan, sehingga terdapat kekurangan 124 orang PPL

Solusi :

- Mengoptimalkan peran serta SDM yang ada di Dinas (Petugas Teknis, Penyuluh dan Inseminator) untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan hewan
- Mengusulkan perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana melalui kegiatan-kegiatan dari berbagai sumber dana.
- Melakukan pelayanan door to door
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan dan penyuluhan secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok, kecamatan dan kabupaten
- Mengadakan pelatihan pengumpulan dan pengolahan data statistik bagi petugas baik kecamatan maupun kabupaten
- Koordinasi antar bidang dalam mendukung pencapaian program
- Sinkronisasi kegiatan atau hasil kegiatan antar bidang dalam perencanaan alokasi kegiatan
- Pemantauan efektifitas pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian oleh kelompok
- Mengalokasikan kegiatan yang berorientasi pada penguatan kelembagaan petani, sekolah lapang maupun revitalisasi

penyuluhan tanaman perkebunan yang diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

- Mengalokasikan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan yang mempunyai output berupa Unit Pengolahan Hasil, Mesin Pengolahan, Mesin Penyulingan dan lain-lain.
- Meningkatkan alokasi kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- Distribusi mendekati melalui agen - agen atau kios - kios pupuk di tiap wilayah
- Perbaiki strategi penyuluhan dan peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian maupun penyuluh PNS maupun penyuluh THL
- Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur JITU
- Pembangunan fasilitas RPH dengan memanfaatkan dana APBN dan Propinsi
- Mengoptimalkan lahan pertanian di wilayah pedesaan dengan pembangunan infrastruktur (jaringan irigasi pedesaan, dam parit)
- Adanya kegiatan dam parit, pemberdayaan kelembagaan, irigasi tanah dangkal
- Mengoptimalkan potensi lahan kering dengan pemakaian pupuk berimbang, benih unggul, pola tanam jajar legowo.
- Peningkatan kapasitas penyuluh sebagai pendamping petani.
- Pengembangan SRI (Sistem Rice Intensive) dengan pemakaian pupuk organik.
- Pelaksanaan Sekolah Lapang GHP (Good Handling Procedure),
- Bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Lapangan
- Pelatihan pengolahan pakan ternak selain pakan hijauan
- Pembentukan sentra/kawasan ternak
- Adanya bantuan untuk peternak misalnya pakan, bibit sapi potong, sapi perah, unggas.
- Adanya pembinaan untuk memberikan pemahaman kepada peternak tentang reproduksi ternak.
- Pelatihan teknologi peternakan tepat guna tentang pengolahan pakan
- Adanya promosi/ pameran produk unggulan peternakan
- Bimbingan teknis, pelatihan dan studi banding ke luar kota.

- Pelayanan kesehatan hewan (Vaksinasi dan desinfektasi, Asistensi Teknik Reproduksi/ATR,)
- Sosialisasi, pengawasan, Edukasi.
- Sosialisasi persyaratan teruak yang akan dipotong
- Pengawasan BAH di pasar
- Sosialisasi RPH
- Pembangunan infrastruktur pertanian melalui dana DAK dan BK
- Penyusunan kebutuhan pupuk per desa
- Demplot pupuk organik
- Mengusulkan rekrutmen tenaga penyuluh pertanian

2. URUSAN KEHUTANAN

Permasalahan dan Solusi :

- Masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pelaku industri kehutanan.
- Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu.
- Dengan telah diberlakukannya Permenhut No. 30 tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Hutan Milik, maka fungsi pengendalian dan pengawasan berada di tingkat desa, sehingga Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengalami kesulitan dalam pengendalian penebangan dan pemasaran produk hasil hutan berupa kayu.
- Pada komoditi Cengkeh terdapat siklus panen raya setiap 4 tahun sekali. Panen raya terakhir terjadi pada tahun 2012 sehingga produksi, produktivitas dan nilai pemasaran pada tahun 2013 s.d 2015 lebih rendah dari tahun 2012 dan diproyeksikan akan mencapai target pada panen raya berikutnya di tahun 2016

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Permasalahan :

- Rendahnya kompetensi teknis dan kesadaran para pelaku usaha pertambangan untuk memenuhi kewajiban
- Belum menerapkan pola penambangan yang baik dan benar
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan
- Masih muncul nya usaha pertambangan tanpa ijin
- Skala usaha pertambangan yang kecil yang menyebar

Solusi :

- Melaksanakan usaha pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha pertambangan secara berkelanjutan untuk dapat memenuhi aspek administratif, teknis, finansial dan lingkungan
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan serta melakukan penambangan secara benar dengan narasumber dari perguruan tinggi dan pengusaha pertambangan skala nasional
- Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi melalui pembinaan dan pengawasan kepada penambang tanpa ijin (PETI) untuk melengkapi kegiatannya dengan Ijin Usaha Pertambangan, serta berkoordinasi dengan SKPD terkait guna melaksanakan penertiban.
- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat penambang.

4. URUSAN PARIWISATA

Permasalahan :

- Keterbatasan dukungan infrastruktur ke obyek wisata, sehingga mengurangi jumlah kunjungan wisata;
- Belum ada gelar atraksi wisata berskala nasional.
- Belum tersusunnya master jalan Geo Park
- Terbatasnya sarana dan prasarana kualitas dan kuantitas SDM pengelola Geopark
- Terbatasnya sarana dan prasarana menuju kawasan Geosik Geopark
- Munculnya destinasi wisata baru, akan tetapi belum ada sarana dan prasarana Penunjang / mendukung
- SDM Pariwisata belum profesional.
- Terbatasnya dana guna menunjang peningkatnya SDM pariwisata
- Etalase Geopark yang sudah 90% jadi belum didukung SDM yang menguasai tentang Geopark.
- Kemacetan pada akses jalan menuju destinasi Pariwisata Goa Gong ke Pantai Klayar dan akses jalan menuju ke destinasi Banyu anget
- Ditemukannya Obyek wisata baru yang belum bisa dikelola karena masih belum ada sarana dan prasarana yang mendukung

Solusi :

- Mengusulkan kepada pemerintah dan pemerintah propinsi untuk membangun prasarana pendukung pengembangan obyek wisata;
- Memfasilitasi pemangku kepentingan bidang pariwisata untuk menciptakan atraksi wisata yang bisa diandalkan, seperti : gelar atraksi wisata bahari, gelar atraksi wisata budaya
- Koordinasi dengan SKPD yang terkait , dalam hal ini SKPD pelaksana Pembangunan sarana dan prasarana
- Peningkatan kualitas SDM pengelola Paraiwisata
- Mengajukan usulan kegiatan baik lewat APBD provinsi maupun APBD
- Peningkatan SDM pengelola pariwisata, dan mengusulkan tenaga ahli di bidang geologi yang bertugas di etalase Geopark gunung sewu Kabupaten Pacitan.
- Kemacetan ini terus terjadi pada saat hari sabtu dan hari minggu, mengingat jalan menuju ke destinasi wisata tersebut masih sangat sempit, solusi yang kami ambil yaitu bekerjasama dengan Polsek setempat dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi dengan dilakukan pengaturan lalu lintas.
- Mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana dasar baik melalui APBD maupun melalui dana dari APBN.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**Permasalahan :**

- Maraknya pencurian ikan/ udang/ biota laut dan keamanan di wilayah perairan Pacitan yang mempengaruhi penurunan hasil tangkapan nelayan Pacitan.
- Sarana prasarana perikanan tangkap yang dimiliki nelayan Pacitan relatif terbatas dan penyebarannya belum merata.
- Sistem pelelangan ikan di TPI belum dapat diterapkan sepenuhnya karena masih adanya ketergantungan nelayan kepada pemodal kuat (bakul), sehingga harga komoditi ditetapkan secara sepihak.
- Belum tersedianya data potensi laut dan ikan serta biota laut lainnya di Kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan potensi lestari yang memadai sebagai dasar perencanaan program.
- Mulai terjadi abrasi dan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir Pacitan.
- Kurangnya penanaman green belt di kawasan pantai sebagai penghalang arus gelombang.
- Teknik penangkapan ikan belum dikuasai oleh nelayan secara optimal.

- Nelayan Pacitan relatif kurang memiliki jiwa wirausaha
- Keterbatasan modal usaha;
- SDM pembudidaya ikan yang belum optimal;
- Keterbatasan sarana produksi utamanya harga pakan yang terus melambung tinggi
- Belum tersedianya bahan baku secara kontinu.
- Kurangnya penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan.
- Terbatasnya pemasaran pengolahan hasil perikanan.
- Pengawasan mutu hasil perikanan dan bahan asal ikan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Belum adanya perda yang mengatur tentang perijinan usaha perikanan.
- Maraknya penggunaan bahan dan alat terlarang dalam penangkapan ikan/udang/biota laut dan keamanan di wilayah perairan Pacitan yang mempengaruhi penurunan hasil tangkapan nelayan Pacitan.
- Keberadaan BBI Jatigunung sebagai penyuplai benih sampai saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan benih bagi seluruh masyarakat Pacitan. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional masih belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
- Sedangkan untuk kebutuhan benih banyak disuplai dari UPR yang ada, khususnya jenis ikan lele.
- Belum tersedianya bahan baku secara kontinu.
- Kurangnya penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan.
- Terbatasnya pemasaran pengolahan hasil perikanan.
- Pengawasan mutu hasil perikanan dan bahan asal ikan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Belum adanya perda yang mengatur tentang perijinan usaha perikanan
- Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat , (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (over fishing), dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, bahan peledak serta potasium dan perlunya penataan dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- Masih rendahnya produksi perikanan budidaya untuk mencukupi kebutuhan lokal, regional maupun ekspor,

keterbatasan modal usaha dan SDM pembudidaya ikan yang belum optimal;

- Keterbatasan sarana produksi utamanya harga pakan yang terus melambung tinggi
- Pengurusan izin produk frozen belum terfasilitasi
- Keberadaan pabrik es yang belum beroperasi dikarenakan masih dalam proses penyiapan administrasi dengan pihak ketiga

Solusi :

- Pembangunan TPI;
- Pemetaan Potensi dan Penetapan Batas Wilayah;
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
- Pembangunan Mercusuar;
- Pembangunan Talud TPI;
- Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pacitan;
- Pembangunan Reventment dan Reklamasi PPP Tamperan;
- Pembangunan lanjutan breakwater PPP Tamperan;
- Penanaman pohon mangrove;
- Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) dan Program Perumahan Nelayan ramah bencana
- Perlu adanya kerjasama dengan mitra / pihak ketiga utamanya dalam kegiatan operasional, penyediaan pakan dan kepastian pasar;
- Perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif oleh petugas dan penyuluh;
- Perlu adanya sosialisasi UU 31 Tahun 2004 dan operasi terpadu pengendalian lingkungan;
- Untuk sarana penunjang budidaya baik tambak maupun BBI diakomodasi dalam kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan bahkan untuk BBI sudah mendapatkan anggaran untuk operasional.
- Perlu adanya penambahan dan peningkatan SDM di Balai Benih Ikan
- Perlu adanya cold storage untuk menyimpan stok bahan baku;
- Perlu adanya pelatihan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- Melaksanakan terobosan pemasaran hasil pengolahan perikanan (pameran, gemarikan, kerjasama dengan stakeholder);

- Melakukan pembinaan kepada pelaku pengolahan hasil perikanan dan pedagang mengenai pengelolaan ikan secara higienis dan aman;
- Menyusun usulan Perda yang mengatur tentang ijin usaha perikanan.
- Pembangunan TPI dan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan
- Penguatan regulasi tentang pelelangan ikan, sosialisasi serta pemantauan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan
- Pemetaan Potensi dan Penetapan Batas Wilayah serta Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pacitan
- Penanaman pohon mangrove serta pelestarian green belt di kawasan pantai sebagai penghalang arus gelombang.
- Melaksanakan kegiatan magang, pelatihan dan studi banding bagi nelayan serta melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
- Pengajuan bantuan permodalan melalui Dana Penguatan Modal (DPM), Dana Ekonomi Produktif (DEP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif oleh petugas dan penyuluh; perijinan usaha perikanan.
- Diupayakan pengurusan ijin produk perikanan frozen dapat difasilitasi di tingkat Kabupaten
- Dilakukan koordinasi dengan DPPKA mengenai besaran sewa dan pengelolaan dengan pihak ketiga agar pabrik es dapat segera dioperasikan
- Pembangunan TPI dan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan
- Penguatan regulasi tentang pelelangan ikan, sosialisasi serta pemantauan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan
- Melakukan pengawasan, konservasi, pembinaan SDM, dan Pemetaan Potensi dan Penetapan Batas Wilayah serta Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pacitan
- Melaksanakan kegiatan magang, pelatihan dan studi banding bagi pembudidaya serta Pengajuan bantuan permodalan melalui Dana Penguatan Modal (DPM), Dana Ekonomi Produktif (DEP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Pembuatan pakan alternatif dan intensifikasi budidaya ikan
- Perlu adanya pelatihan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- Melaksanakan terobosan pemasaran hasil pengolahan perikanan (pameran, gemarikan, kerjasama dengan stakeholder);
- Melakukan pembinaan kepada pelaku pengolahan hasil perikanan dan pedagang mengenai pengelolaan ikan secara higienis dan aman;
- Diupayakan pengurusan ijin produk perikanan frozen dapat difasilitasi di tingkat Kabupaten

6. URUSAN PERDAGANGAN

Permasalahan :

- Tradisi pemakaian UTTP yang tidak benar oleh pedagang
- Kurangnya kesadaran para wajib tera dan tera ulang
- Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pacitan
- Belum optimalnya promosi potensi dan komoditi unggulan daerah
- Kenaikan harga sembako menjelang hari raya idul fitri
- Rendahnya mutu dagangan PK5 dan Asongan
- Kenaikan harga yang fluktuatif karena perilaku pasar.
- Belum optimalnya penataan pasar modern dan pembinaan pasar tradisional
- Harga jual fluktuatif disebabkan karena harga barang baku, dan ongkos produksi meningkat
- Tradisi masyarakat pemakai UTTP yang kurang benar.
- Kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan wajib tera & tera ulang.
- Waktu pelaksanaan sidang tera dan tera ulang UTTP serta tenaga yang membidangi tera terbatas
- Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pacitan.
- Promosi potensi dan komoditi unggulan masih kurang optimal.
- Kenaikan harga sembako menjelang hari – hari besar keagamaan dan pada bulan – bulan musim perkawinan.
- Mutu dagangan PK-5 dan Asongan kurang memenuhi standart kesehatan.
- Kenaikan harga yang fluktuatif disebabkan perilaku/dinamika pasar.
- Penataan pasar modern dan pembinaan pasar – pasar tradisional kurang optimal.
- Sulitnya memperoleh data yang akurat tentang jumlah kebutuhan sembako dan ketersediaan stok.

- Kesadaran Pemilik UTTP untuk melaksanakan Tera Ulang mulai menurun
- Harga sembako rata-rata ada kenaikan yang disebabkan pasokan barang kurang, dampak kenaikan BBM, saat-saat musim tanam dan hari besar keagamaan
- Pendistribusian pupuk ada keterlambatan khususnya di lini tiga
- Peredaran minuman beralkohol
- Promosi potensi komoditi unggulan masih kurang
- Masih adanya makanan/ jajanan PKL dan asongan yang tidak sehat/ mengandung zat-zat yang merugikan kesehatan
- Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap orientasi export
- Belum terbentuknya asosiasi usaha yang memadai
- Kesadaran Pemilik Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melaksanakan Tera Ulang mulai menurun
- Harga sembako rata-rata mengalami kenaikan yang disebabkan pasokan barang kurang, dampak perubahan harga BBM, Anomali iklim, masa musim tanam, hari baik/hajatan dan hari besar keagamaan.
- Pendistribusian pupuk ada keterlambatan khususnya di lini empat (Pengecer/kios resmi)
- Masih adanya makanan/jajanan PKL dan asongan yang tidak sehat/mengandung zat-zat yang merugikan kesehatan

Solusi :

- Dilaksanakan wajib tera dan tera ulang secara rutin tiap tahun
- Dilaksanakan pengawasan bersama dengan BDKT
- Pelaksanaan Gelar promosi di dalam dan luar daerah, dan adanya gerakan penggunaan produk dalam negeri serta pasar lelang.
- Adanya program operasi pasar khusus
- Adanya pengawasan mutu dagangan dan pembinaan PK5 dan Asongan serta bantuan tenda
- Adanya operasi pasar murah dan monitoring harga sembako dan barang penting lainnya
- Adanya rencana penyusunan Raperda penataan pasar.
- Peningkatan sarana produksi dan peningkatan SDM pengrajin dimana dituntut lebih kreatif untuk bersaing
- Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UTTP
- Pelaksanaan Pengawasan BDKT.

- Pelaksanaan Gelar promosi potensi didalam daerah, gerakan penggunaan produk dalam negeri dan pasar lelang
- Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
- Pelaksanaan pengawasan dan uji lab mutu dagang PK-5 dan Asongan.
- Pelaksanaan monitoring harga sembako dan barang penting lainnya.
- Pelaksanaan revitalisasi dan rehap pasar tradisional
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam beberapa kegiatan terpadu
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemilik UTTP
- Melakukan monitoring harga secara rutin dan operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga
- Koordinasi dengan pihak terkait agar pendistribusian pupuk lancar
- Melakukan monitoring dan pengawasan
- Para UKM dikutkan pameran
- Diadakan Uji Lab dari makanan yang mempunyai indikasi mengandung zat-zat yang sangat berbahaya
- Mengikuti bimbingan dan pelatihan export dibalai diklat
- Pembinaan dan koordinasi secara rutin terhadap pelaku usaha
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemilik Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
- Melakukan monitoring dan evaluasi harga secara berkelanjutan
- Mengadakan pasar murah dan operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan harga.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pendistribusian pupuk lancar
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka uji lab untuk makanan yang mempunyai indikasi mengandung zat-zat yang berbahaya

7. URUSAN INDUSTRI

Permasalahan :

- Sumber daya Manusia yang masih belum professional
- Sarana dan Prasarana/Penggunaan teknologi Pengolahan belum memadai
- Masih mudahnya pemahaman dan legalitas HAKI
- Promosi dan Pemasaran belum berkembang
- Akses permodalan khususnya modal dengan suku bunga rendah masih lemah
- Sumber daya Manusia yang masih belum professional